

ANALISIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI BERDASARKAN *INDEX FOR INCLUSION*

Retno Sulistiyaningih, Muryantinah Mulyo Handayani

ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan indikator *Index for Inclusion* yang meliputi dimensi budaya, kebijakan, dan praktik. Definisi pendidikan inklusi merujuk kepada Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi yang dianalisis menggunakan perspektif *Index for Inclusion* dari Booth & Ainscow (2002).

Penelitian ini berfokus di SD YBPK Semampir Kota Kediri. Peneliti menggunakan tipe studi kasus untuk mengetahui isu terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi secara lebih mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah guru, siswa, dan orang tua siswa SD YBPK Semampir Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan tipe analisis tematik.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi telah memenuhi seluruh indikator dalam tiga dimensi *Index for Inclusion*, yaitu dimensi budaya, kebijakan, dan praktik. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya, ada beberapa indikator pada masing-masing dimensi *Index for Inclusion* yang perlu dikembangkan.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pendidikan Inklusi, *Index for Inclusion*.

PENDAHULUAN

Kebijakan terkait pendidikan inklusi telah banyak diimplementasikan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, kebijakan terkait pendidikan inklusi telah lama didengungkan dan puncaknya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif bertujuan “Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.” dan pada Ayat 2 berbunyi “Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.” Selain Permendiknas tersebut, sebelumnya juga telah disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang diantaranya berisi kewajiban pemerintah dalam menjamin

hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kemudahan dalam pelayanan pendidikan, tak terkecuali bagi mereka yang memiliki kelainan. Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 5, Ayat 1 menyebutkan “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Lebih lanjut, Ayat 2 berbunyi “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” Pasal 11 Ayat 1 berbunyi “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.” Melalui kebijakan tersebut, semakin menegaskan bahwa pemerintah benar-benar menjamin dan melindungi hak pendidikan setiap individu, baik masyarakat pada umumnya maupun mereka yang berkebutuhan khusus. Undang-Undang di atas juga menunjukkan bahwa semua warga negara usia sekolah mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta layanan pendidikan untuk semua (*education*

for all), pendidikan inklusi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Selama ini, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus diarahkan ke SLB. Permasalahan yang timbul adalah banyak orang tua yang merasa malu untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekurangan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) (Gambaran Sekolah Inklusi di Indonesia pada Sekolah Menengah Pertama: 2016). Selain masalah penerimaan, jumlah SLB yang ada saat ini belum sesuai dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia berjumlah 1,6 juta anak, akan tetapi baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sebanyak 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.

Adanya pendidikan inklusi dapat menjadi alternatif bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekhususan ke sekolah-sekolah reguler. Akan tetapi tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK, karena pendidikan inklusi diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi maupun sekolah swasta yang menginisiasi pendirian sekolah inklusi (Kadir: 2015).

Sebanyak 32 ribu sekolah di Indonesia (berdasarkan data Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, tetapi masih banyak yang belum sesuai dengan konsep yang

mendasarinya. Pendidikan inklusi masih dipahami sebagai upaya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah reguler dengan sistem pembelajaran yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, namun peserta didik berkebutuhan khusus yang menyesuaikan dengan sistem yang ada. Artinya, pendidikan inklusi masih cenderung dipahami sama dengan pendidikan integrasi.

Menurut Zabeli dan Behluli (2014) kendala yang selama ini dihadapi oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Norwegia adalah ketidakpahaman staf dan komunitas terhadap kebijakan tersebut. Staf selama ini hanya disibukkan dengan kegiatan administratif dan tidak mendapatkan porsi dalam sosialisasi kebijakan. Karena hal tersebut, banyak staff dan komunitas yang memiliki hambatan dalam menciptakan budaya inklusi dan turut serta dalam praktik inklusi itu sendiri.

Hasil penelitian dari Ni'matuzahroh di TK Aisyiyah Kabupaten Malang (2015) menyimpulkan bahwa beberapa kendala yang ada dalam penyelenggaraan kelas inklusi yaitu pemahaman terhadap kurikulum berdiferensiasi, sarana prasarana, pengetahuan tentang inklusi yang minim, penolakan keberadaan siswa ABK, penolakan siswa reguler belajar bersama dengan ABK, dan pengetahuan guru yang minim tentang cara memperlakukan ABK. Kurikulum berdiferensiasi merupakan kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa ABK, dengan adanya penekanan pada materi secara esensial sehingga dapat memacu dan memberikan wadah bagi pengembangan spiritual, logika, etika dan estetika, serta kreatifitas siswa ABK (Gambaran Sekolah Inklusi di Indonesia: 2016). Sarana dan prasarana yang ada belum mampu menunjang kebutuhan akan peserta didik yang berkebutuhan khusus, misalnya tata ruang untuk peserta didik dengan tuna daksa. Minimnya pemahaman akan pendidikan inklusi menyebabkan cara

pandang komunitas yang sempit, yaitu tumpang tindihnya pendidikan integrasi dengan pendidikan inklusi. Selain itu keberadaan siswa berkebutuhan khusus yang bercampur dengan siswa reguler, kadangkala membuat siswa maupun orang tua dari siswa reguler merasa tidak nyaman.

Berdasarkan penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terangkum dalam Gambaran sekolah Inklusif di Indonesia (Tinjauan Sekolah Menengah Pertama, 2016) menyatakan bahwa permasalahan pendidikan inklusi adalah belum tercukupinya kebutuhan GPK yang sesuai dengan jenis kekhususan siswa. Jumlah siswa inklusi tidaklah sebanding dengan jumlah GPK yang ada. Selain itu, penempatan GPK juga belum merata dan masih banyak sekolah yang belum memiliki GPK. Tercatat sebanyak 478 SMP inklusi yang berada di Jawa Timur dengan jumlah GPK sebanyak 237 orang dan dengan jumlah siswa inklusi sebanyak 3.241 siswa. Artinya, setiap GPK di Jawa Timur memegang sekitar 13 sampai 14 siswa berkebutuhan khusus. Idealnya, setiap GPK memegang 3 siswa berkebutuhan khusus.

Kota Kediri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang telah melaksanakan program pendidikan inklusi. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 9 Sekolah Dasar dan 5 Sekolah Menengah Pertama yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi (sumber: tribunnews.com, tanggal 7 Juni 2017). Hambatan yang selama ini dihadapi oleh sekolah inklusi di Kota Kediri adalah minimnya GPK serta GPK yang ada merupakan guru reguler yang diminta dan bersedia menjadi guru pendamping khusus. SDN Betet 1 tercatat sebagai sekolah inklusi terbesar di Jawa Timur dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus sebanyak 70 siswa dari total keseluruhan siswa sebanyak 338 siswa (sumber: beritajatim.com, tanggal 29 November 2016). Selain itu dari sekitar 40 GPK yang terdapat di Kota Kediri, hanya 3 yang merupakan lulusan pendidikan luar

biasa, sementara yang lainnya berasal dari jurusan kependidikan yang lainnya (hasil wawancara dengan ketua MGPK Kota Kediri Harita Chandra pada tanggal 13 April 2018).

Berbagai hambatan dan kendala dihadapi oleh penyelenggara pendidikan inklusi dalam menyelenggarakan program inklusi baik di Indonesia maupun di negara lain. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, hambatan tersebut berasal dari ketidakpahaman staf dan komunitas terhadap kebijakan pendidikan inklusi yang dilaksanakan, pemahaman terhadap kurikulum berdiferensiasi, sarana prasarana yang belum mendukung program pembelajaran untuk sekolah inklusi, pengetahuan tentang inklusi yang minim, penolakan keberadaan siswa ABK, dan penolakan siswa reguler belajar bersama dengan ABK. Kendala yang berasal dari guru adalah pengetahuan guru yang minim tentang cara memperlakukan ABK. Selain itu, belum tercukupinya kebutuhan GPK yang sesuai dengan jenis kekhususan siswa, minimnya GPK, penempatan GPK juga belum merata dan masih banyak sekolah yang belum memiliki GPK. serta GPK yang ada merupakan guru reguler yang berasal dari jurusan selain Pendidikan Luar Biasa.

Terlepas dari beberapa hambatan yang dialami oleh penyelenggara sekolah inklusi, ada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang telah menerapkan nilai-nilai inklusi dalam penyelenggaraannya. SD Lazuardi Kamila di Surakarta merupakan salah satu penyelenggara sekolah inklusi yang memposisikan diri sebagai resource center bagi sekolah inklusi. SD Lazuardi mengembangkan soft skill pengajar sehingga pengajar mampu melakukan asesmen dan terapi kepada ABK, merancang pembelajaran yang bervariasi untuk ABK, serta pengajar belajar untuk membuat Alat Permainan Edukasi (APE) yang memiliki nilai edukasi dan ramah lingkungan secara mandiri (Ariastuti & Herawati, 2016).

Penyelenggara pendidikan inklusi yang lain adalah SDN Sumpalsari 1 Malang. Penyelenggaraan program inklusi di SDN Sumpalsari 1 menggunakan kurikulum reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Penerimaan peserta didik di SDN Sumpalsari 1 Malang tidak menggunakan sistem seleksi. Semua siswa berkebutuhan khusus yang mendaftarkan diri diterima oleh sekolah, namun siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah yang lebih diutamakan. Pembelajaran dibuat secara fleksibel dengan sistem pull out. Hubungan antar komunitas seperti guru, orang tua dan masyarakat terjalin harmonis yang salah satunya dengan adanya bantuan berupa buku dan alat musik yang digunakan untuk menunjang pembelajaran (Agustin, 2016).

Penyelenggaraan pendidikan inklusi telah lama terlaksana di beberapa daerah di Indonesia. Pada pelaksanaannya ada hambatan dan kendala yang dihadapi, namun hal tersebut tidak menyurutkan para penyelenggara untuk tetap menjalankan program yang sesuai dengan nilai-nilai inklusi. Sekolah penyelenggara mempunyai beberapa metode untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusi pada lembaganya masing-masing seperti mengembangkan soft skill pengajar sehingga pengajar mampu melakukan asesmen dan terapi kepada ABK, merancang pembelajaran yang bervariasi untuk ABK, serta belajar untuk membuat Alat Permainan Edukasi (APE). Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Penerimaan peserta didik tidak menggunakan sistem seleksi, akan tetapi semua siswa diterimah khususnya yang rumahnya berdekatan dengan sekolah. Sekolah juga menjalin komunikasi yang harmonis dengan seluruh komunitas terkait seperti orang tua dan masyarakat.

Melihat pada hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi serta upaya sekolah untuk terus

mengembangkan layanan inklusi yang lebih baik, maka tanggung jawab pengembangan layanan inklusi bukan hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Jika kita melihat *Index for Inclusion*, pemahaman terkait diferensiasi bukan semata tanggung jawab dari guru, namun seluruh komunitas yang terlibat seperti kepala sekolah, guru, staff, murid, serta orang tua dituntut untuk memiliki pemahaman yang sama akan sekolah inklusi (Booth & Ainscow, 2002).

Keberadaan dan pengembangan sekolah inklusi tidak terlepas dari peran seluruh komunitas yang ada seperti pemerintah, guru reguler, guru pendamping khusus, siswa, staf, orang tua, serta masyarakat sekitar. Terpenuhinya sarana dan prasarana maupun ketersediaan pengajar tidak cukup untuk dijadikan acuan dalam pengembangan pendidikan inklusi, lebih dari itu inklusi dimaknai dengan terciptanya budaya yang menjunjung nilai-nilai inklusi itu sendiri. Budaya inklusi, dijadikan acuan dalam menentukan rancangan dan kebijakan sekolah sehingga dalam praktiknya pendidikan inklusi benar-benar dapat menjamin baik guru, siswa, maupun komunitas untuk merasa nyaman dengan keberanekaragaman. Seluruh komunitas tersebut dapat melihat keberagaman bukan sebagai suatu masalah, namun sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pola pengembangan sekolah inklusi berdasarkan *Index for Inclusion* (Booth & Ainscow, 2002).

Index for Inclusion merupakan suatu sumberinformasi untuk mendukung pengembangan sekolah inklusi yang berprinsip untuk mengembangkan sekolah dan meletakkan nilai-nilai inklusi dalam pelaksanaannya (Booth & Ainscow, 2002). Pengertian inklusi dalam indeks ini bukan hanya terbatas pada ABK, namun mengacu kepada prinsip pendidikan untuk semua. Indeks ini dibuat untuk membantu sekolah mengembangkan pendidikan inklusi berdasarkan nilai-

nilai yang akan dikembangkan sekolah. Jadi dalam indeks ini, sekolah sendiri yang akan mengembangkan sampai sejauh mana proses pelaksanaan pendidikan inklusi di lingkungan sekolah masing-masing dengan mengacu kepada indikator-indikator yang terdapat dalam indeks.

Berbagai penelitian tentang pelaksanaan pendidikan inklusi telah banyak dilakukan. Beberapa fokus pada hambatan dan kendala yang dialami sekolah, sementara yang lain fokus pada upaya mengembangkan sekolah inklusi. Meskipun kebijakan pendidikan inklusi telah digagas bertahun-tahun lamanya dan telah dikeluarkannya aturan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, namun fakta dilapangan menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dari sisi penyelenggaraannya dan terus dilakukan upaya untuk mengembangkan pelayanan inklusi yang selama ini telah berjalan (sumber: edukasi.kompas.com, tanggal 15 Oktober 2009). Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengkaji lebih lanjut bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan perspektif *Index for Inclusion* di Kota Kediri dengan melihat berbagai hambatan dan upaya pengembangan yang telah dilakukan di daerah lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang analisis penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan *Index for Inclusion* menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penulis menggunakan jenis studi kasus intrinsik, yaitu penelitian yang dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus khusus. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 (satu) Sekolah Dasar di wilayah Kota Kediri yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi yaitu SD YBPK (Yayasan Badan Pendidikan Kristen) Semampir Kota Kediri dengan informan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Adapun

teknik penggalan data dalam penelitian ini menggunakan empat proses penggalan data yakni wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik.

HASIL PENELITIAN

0.1. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Dimensi Budaya

Dimensi budaya merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Berdasarkan dimensi budaya, penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SD YBPK telah berjalan dengan cukup lancar, namun masih terdapat beberapa bagian, sesuai indikator yang terdapat dalam *Index for Inclusion*, yang perlu untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan.

Kesan yang muncul saat pertama kali datang ke SD YBPK Semampir adalah pihak sekolah ramah. Pihak sekolah terbuka terhadap informasi yang ingin diketahui masyarakat yang berkaitan dengan sekolah. Sekolah mengakomodir beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa isyarat jika diperlukan oleh pengunjung atau tamu.

Siswa di SD YBPK telah terbiasa saling tolong menolong. Siswa reguler lebih sering menawarkan dan memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus. Latar belakang siswa yang beragam membuat sekolah sangat menghargai perbedaan. Semua siswa dan warga sekolah dipanggil sesuai dengan nama panggilan masing-masing, tidak ada nama julukan atau nama yang terkesan diskriminatif. Siswa saling menghargai pencapaian awal siswa yang beragam dan nantinya akan saling membantu untuk mengurangi hambatan di kelas. Adakalanya siswa reguler terlalu sibuk dan asik bermain sendiri sehingga lupa mengajak siswa berkebutuhan khusus. Ada juga siswa reguler yang tidak mau untuk berbaur dengan siswa berkebutuhan khusus.

Hubungan antar staf berjalan dengan harmonis. Semua staf diundang untuk menghadiri rapat atau pertemuan rutin sekolah. Jika banyak guru yang berhalangan hadir karena suatu kesibukan tertentu, seperti pada kasus GPK, akan dicari alternative waktu pertemuan yang lain sehingga semua guru dan staf dapat saling berkoordinasi. Guru bekerjasama untuk mengawasi seluruh siswa tanpa memandang guru kelas berapa.

Guru dan siswa saling menghormati satu sama lain. Guru bersikap ramah namun juga tegas terhadap siswa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Siswa dengan senang hati membantu guru jika guru memerlukan bantuan. Dari kerjasama tersebut, muncul rasa saling menyayangi antara guru dan siswa.

Pola komunikasi anatar guru dan orang tua dari siswa SD YBPK berjalan dengan harmonis. Sekolah akan mensosialisasikan setiap kebijakan yang diambil khususnya yang berkaitan dengan siswa. Kadangkala orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran seperti mendampingi siswa untuk mengikuti ulangan dikarenakan minimnya GPK sehingga GPK harus membari tugas membantu beberapa siswa berkebutuhan khusus lainnya. Ada buku penghubung yang ditulis oleh guru kelas dan GPK untuk dibawa siswa pulang setiap harinya sehingga orang tua mengetahui kegiatan siswa di sekolah dan rencana kegiatan belajar siswa pada esok harinya. Pada awal penerimaan siswa baru, ada kesepakatan yang dibuat oleh orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan pihak sekolah yang menyatakan bahwa orang tua tidak menuntut pencapaian siswa secara akademik, namun lebih kepada kemandirian dan kemampuan komunikasi dan bersosialisasi.

Sekolah menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dinas memfasilitasi kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop untuk GPK untuk menunjang

pemahaman tentang inklusi. Dinas Pendidikan juga membantu memfasilitasi psikolog dan kegiatan asesmen pada awal penerimaan siswa baru. GPK yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan diberikan bantuan berupa insentif setiap bulannya. Akan tetapi bantuan materiil berupa alat bantu pembelajaran dan gedung baru belum diberikan oleh dinas setempat.

Kegiatan yang ada dan diselenggarakan oleh sekolah ditangani oleh guru dan staf, orang tua hanya diberitahukan dan kadangkala diundang dalam kegiatan tersebut, namun tidak terlibat dalam proses persiapan acara sampai selesai. Kegiatan yang berada diluar sekolah akan dipantau oleh guru, seperti kegiatan berenang atau kunjungan siswa ke tempat umum. Pihak sekolah secara berkala memberikan sosialisai tentang pendidikan inklusi kepada orang tua.

Sekolah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pencapaian siswa. Ekspektasi tersebut tidak hanya berlaku pada pencapaian akademis, tetapi juga non akademik. Pencapaian akademik lebih diarahkan kepada siswa reguler, sementara pencapaian non akademik yang berupa kemampuan bina diri dan kemampuan komunikasi dua arah serta bersosialisasi diarahkan kepada siswa berkebutuhan khusus. Ada dua jenis ulangan yang diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus yaitu ulangan reguler seperti halnya pada siswa reguler dan ditambah dengan ulangan inklusi. Siswa reguler mendapatkan tambahan pelajaran setelah pulang sekolah dan siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan jadwal terapi di ruang sumber.

Seluruh komunitas membantu menyebarkan filosofi inklusi kepada orang disekitarnya. Guru memberikan pemahaman kepada siswa akan keanekaragaman yang ada di sekolah, sehingga siswa dan guru harus saling menghormati perbedaan yang ada. Pihak sekolah menyebarkan filosofi inklusi melalui sosialisasi kepada orang tua maupun melalui forum konsultasi orang

tua secara individu. Para orang tua merasa khawatir karena filosofi inklusi hanya tersebar di sekolah. Masyarakat secara umum banyak yang belum memahami inklusi. Filosofi inklusi juga belum tersebar keseluruh sekolah terutama yang belum menyelenggarakan inklusi.

SD YBPK Semampir memandang dan memperlakukan siswa dengan sama. Siswa saling menolong, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Berbagai latar belakang siswa diterima dalam satu sekolah sehingga siswa terbiasa berbaaur satu sama lain. Hasil karya siswa dihargai dengan cara disimpan di perpustakaan dan diletakkan di tempat khusus. Hasil karya tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan siswa seperti kegiatan lomba. Warga sekolah lebih sering menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari, menggunakan bahas Indonesia dalam pembelajaran, dan menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin dalam program ekstrakurikuler. Siswa dan guru saling memberikan dukungan ketika ada warga sekolah yang sakit atau tertimpa musibah agar segera kembali bersekolah.

Guru mencoba meminimalisir hambatan belajar yang dialami oleh siswa. Siswa yang kesulitan komunikasi dua arah akan dibantu dengan penggunaan kata atau kalimat yang berulang-ulang. Guru akan menggunakan bahasa isyarat kepada siswa yang mengalami tuna rungu ketika siswa kurang bisa memahami bahasa oral yang digunakan oleh guru atau temannya yang lain. Sekolah juga mengadakan pertemuan rutin guru dan staf untuk melakukan supervisi dan membahas permasalahan serta hambatan yang dialami di kelas.

Sekolah berusaha meminimalisir semua bentuk diskriminasi. Siswa diajarkan untuk saling menghargai, tidak membedakan apakah siswa reguler atau siswa berkebutuhan khusus, apakah laki-laki atau perempuan. Namun dalam prakteknya masih ada siswa yang membatasi bermain

hanya dengan siswa yang reguler atau yang laki-laki saja dan selebihnya mereka cukup menjadi teman satu kelas. Adanya perhatian eksklusif yang ditujukan guru kepada siswa berkebutuhan khusus membuat siswa reguler sedikit menjauhi siswa berkebutuhan khusus. Ada kekhawatiran dari siswa reguler jika mengajak bermain siswa berkebutuhan khusus karena jika terjadi sesuatu misalnya jatuh saat bermain, maka siswa reguler yang akan disalahkan.

Berdasarkan dimensi budaya, SD YBPK Semampir Kota Kediri telah memenuhi seluruh indikator dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kelebihan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD YBPK terletak pada indikator semua orang merasa diterima, staf saling berkolaborasi, adanya ekspektasi atau harapan yang tinggi terhadap siswa, dan siswa dipandang sama. Indikator yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi kedepannya adalah siswa saling membantu satu sama lain, seluruh komunitas membagikan filosofi inklusi, semua komunitas lokal terlibat di sekolah, dan sekolah berusaha meminimalisir semua bentuk diskriminasi.

0.2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan tidak kalah pentingnya dalam suatu pelaksanaan program sekolah inklusi. Kebijakan terkait penunjukan guru dan staf baru di SD YBPK terbuka untuk umum. Informasi disebar dari mulut ke mulut dan siswa saja yang memenuhi kualifikasi dan berminat bisa mendaftarkan diri di SD YBPK. Guru dan staf yang baru bergabung di SD YBPK diberikan pemahaman tentang kondisi keragaman yang ada di sekolah. Guru dan staf baru diberikan kesempatan untuk melakukan masa uji coba terlebih dahulu, jika mereka nyaman mereka dapat melanjutkan di SD YBPK atau dapat memilik untuk mengabdikan diri ditempat yang lain.

Bangunan SD YBPK telah berdiri sejak sekolah dibuka. Penyesuaian dilakukan ketika sekolah berinisiatif untuk menjadi sekolah inklusi. Bangunan dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, baik regular maupun berkebutuhan khusus. Bagian antar bangunan dibuat landai dibagian tertentu sehingga memudahkan mobilisasi semua orang.

Penerimaansiswabaru di SD YBPK terbuka untuk umum. Setiap tahunnya SD YBPK menerima 5 sampai 6 siswa berkebutuhan khusus untuk jenjang kelas 1, namun untuk siswa pindahan akan dipertimbangkan jika kuota peserta didik masih mencukupi. Siswa regular SD YBPK berasal dari masyarakat di sekitar Kelurahan Semampir Kota Kediri. Sementara siswa berkebutuhan khusus berasal dari masyarakat Kota Kediri, dan kota tau kabupaten sekitar seperti Tulungagung, kabupaten Kediri, dan Nganjuk. Seperti halnya pada staf dan guru baru, siswa baru juga dibantu agar merasa nyaman di lingkungan sekolah. Siswa baru akan disambut oleh siswa dari kelas lain. Siswa baru yang merupakan siswa pindahan akan dibantu bersosialisasi dengan siswa yang lama.

Sekolah menyusun grup mengajar untuk mewadahi seluruh siswa. Siswa regular disediakan kelas tambahan setelah jam pulang sekolah setiap harinya. Siswa berkebutuhan khusus disediakan fasilitas terapi yang diadakan 3 kali seminggu untuk masing-masing siswa. Sekolah menyediakan program calistung untuk siswa baru yang masih memerlukan pendalaman calistung. Selain itu, manajemen kelas disusun sedemikian rupa sehingga terjadi variasi seperti adanya pengaturan tempat duduk yang berbeda beda. Siswa berkebutuhan khusus kadangkala akan duduk dengan siswa regular dan sesama siswa berkebutuhan khusus dan begitu juga sebaliknya.

SD YBPK Semampir mengkoordinasikan semua bentuk dukungan dari komunitas. Dukungan dari Dinas pendidikan berupa

kegiatan workshop, studi banding, seminar dan pengadaan insentif bagi GPK dikoordinasikan dengan seluruh GPK. Dukungan dari masyarakat berupa rekomendasi psikolog dimanfaatkan oleh sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua dan siswa tentang pemahaman sekolah inklusi. Sekolah juga menjalin kerjasama dengan SLB terkait penerimaan siswa baru yang belum bisa ditangani oleh pihak SD YBPK untuk kemudian direkomendasikan kepada SLB.

Kebijakan yang dibuat oleh SD YBPK Semampir dibuat tanpa membedakan suatu pihak. Kebijakan dibuat dengan memperhatikan nilai inklusi didalamnya. Pengelolaan kelas maupun sekolah tidak mengelompokkan siswa regular dan siswa berkebutuhan khusus secara terpisah. Pada saat jam pelajaran terjadi penarikan siswa berkebutuhan khusus di waktu tertentu untuk mengikuti terapi yang diadakan di ruang sumber. Sekolah berusaha meminimalisir pengelompokan yang terjadi di lingkungan sekolah, namun pada kenyataannya masih terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki kecenderungan hanya berkumpul dan bermain dengan sesama siswa berkebutuhan khusus.

SD YBPK membuat kebijakan berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Program Pembelajaran Individual (PPI) dibuat sesuai dengan kemampuan siswa. Pada awal tahun pelajaran, GPK membuat PPI untuk diserahkan kepada koordinator GPK untuk dicek, PPI yang sudah sesuai akan digunakan dalam proses pembelajaran sedangkan yang belum sesuai akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa dan saran dari koordinator GPK.

Sekolah membuat kebijakan dan peraturan untuk dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Penerapan kedisiplinan tidak sampai membuat siswa dikeluarkan dari kelas maupun sekolah. Siswa yang keluar

dari kelas akan dibujuk untuk mengikuti pembelajaran didalam kelas, namun guru akan bersiap tegas jika siswa tersebut tidak mau mengikuti saran dari guru. siswa akan dibiarkan berada diluar kelas, sementara guru dan siswa yang lain akan meneruskan kegiatan pembelajaran. Kedisiplinan juga berlaku untuk absensi siswa. Siswa yang tidak hadir di sekolah akan dikonfirmasi oleh guru terkait alasan ketidakhadirannya dan selanjutnya didorong untuk terus hadir dalam kegiatan belajar di sekolah.

SD YBPK meminimalisir tindakan bullying yang ada di sekolah. Korban dari bullying adalah siswa yang pendiam. Untuk meminimalisirnya, guru melakukan pengawasan terhadap siswa. Guru akan menjauhkan siswa dari pelaku bullying atau menyarankan untuk berbaur dengan siswa yang lain. Guru dan staf akan memberikan pemahaman kepada siswa untuk saling menjaga toleransi dan saling mngasihi antar siswa yang diselipkan melalui pelajaran.

Berdasarkan dimensi kebijakan, SD YBPK Semampir Kota Kediri telah memenuhi seluruh indikator dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kelebihan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD YBPK berdasarkan dimensi kebijakan terletak pada indikator penunjukan dan promosi staf berlangsung dengan adil, sekolah membuat bangunan yang dapat diakses oleh semua orang, semua siswa baru dibantu untuk merasa nyaman di sekolah, dan semua bentuk dukungan dikoordinasi. Indikator yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah sekolah menerima semua siswa yang berdekatan dengan sekolah, aturan atau Undang-Undang tentang layanan pendidikan khusus digunakan untuk mengurangi hambatan dalam belajar dan hambatan berpartisipasi semua siswa, dan tindakan bullying diminimalisir.

0.3. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Dimensi Praktik

Selain budaya dan kebijakan, praktik menjadi hal yang cukup penting dimana dimensi ini merupakan implementasi dari dua dimensi sebelumnya. Praktik inklusi yang terdapat di SD YBPK telah banyak mengalami perkembangan selama delapan tahun terakhir. Pihak sekolah berusaha untuk melakukan harmonisasi pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran untuk seluruh siswa. Semua siswa diwadahi agar pembelajaran dapat mewakili kebutuhan dan kemampuan siswa. RPP dibuat oleh guru dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan dari rata-rata siswa. Sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Akan tetapi, jenis kegiatan ekstrakurikuler ditentukan oleh sekolah berdasarkan jenjang kelas sehingga siswa tidak dapat memilih kegiatan ekstra yang sesuai dengan minatnya. Siswa mengikuti kegiatan ekstra yang sesuai dengan jenjang kelas masing-masing.

Pelajaran yang disampaikan didalam maupun diluar kelas diharapkan dapat mendorong partisipasi dari seluruh siswa. Dalam pembelajarn di kelas, guru lebih sering menyampaikan materi dan selanjutnya siswa diminta untuk membaca materi secara individu maupun membaca secara bergantian dengan siswa yang lain. Siswa juga diminta untuk melakukan praktik pembelajaran seperti berdialog di depan kelas. Tidak semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, ada siswa yang asik bermain dengan temannya dan asik bermain dengan mainan yang dibawanya.

Siswa dilibatkan dalam pembelajarannya secara aktif melalui penugasan individu dan kelompok serta melalui pembelajaran mandiri melalui perpustakaan. Siswa dibiasakan untuk membuat catatan pada setiap pelajaran. Hasil pembelajaran disampaikan oleh siswa melalui tulisan dan lisan. Siswa yang merasa memiliki kesulitan dalam

memahami pelajaran akan meminta tambahan penjelasan kepada guru kelas maupun GPK.

Salah satu bentuk harmonisasi pembelajaran adalah siswa belajar secara bersama-sama. Penewaran dan pemberian bantuan dalam aktivitas belajar dikelas menjadi pemandangan biasa yang terdapat di SD YBPK. Siswa reguler tanpa diminta oleh guru akan membantu siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar. Beberapa siswa reguler ditunjuk oleh guru untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya yang lain. Mereka bertugas mendampingi siswa berkebutuhan khusus secara bergantian dan membantu hambatan belajar temannya. Siswa dan guru saling menjaga kondusifitas dan kenyamanan kelas bersama. Jika ada siswa yang menangis atau berteriak di kelas, siswa dengan tanggap akan membantu menenangkan.

Kegiatan pembelajaran dilakukan didalam kelas dan diluar kelas. Seluruh siswa berpartisipasi dalam aktivitas diluar kelas. Sekolah sering mengikuti kegiatan lomba yang dilaksanakan pada tingkat sekolah sampai tingkat provinsi. Siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dilibatkan dalam kegiatan lomba tersebut. Siswa juga terlibat aktif dalam kegiatan diluar sekolah seperti berenang dan melakukan kunjungan ke tempat umum seperti di pasar.

Perbedaan siswa serta keahlian staf dan guru dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Guru yang pandai menari diminta untuk menjadi pelatih tari. Siswa juga memiliki kecenderungan masing-masing dalam belajar. Ada siswa yang lebih suka membaca di perpustakaan ketika jam istirahat berlangsung, ada siswa yang lebih suka mendatangi orang tuanya dan melihat video, ada juga yang bermain dilapangan serta ada yang pada jam istirahat membuat prakarya dan mengajari siswa yang lain. Proses pembelajaran kadangkala dilakukan diluar kelas seperti perpustakaan, namun koleksi perpustakaan masih sebatas

buku fiksi dan non fiksi. Setiap kelas belum memiliki LCD untuk mendukung pembelajaran berbasis media, namun pada hari tertentu siswa dikumpulkan dan diajak untuk menonton film dan video secara bersama-sama sebagai bagian dari pembelajaran.

Ada banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Sumber lokal yang menjadi fasilitas umum seperti pasar dan kolam renang telah dimanfaatkan untuk proses pembelajaran di SD YBPK Semampir, namun fasilitas umum lainnya belum dapat dimanfaatkan karena terbatasnya jarak tempuh. Pembelajaran dengan memanfaatkan komunitas yang ada seperti orang tua atau masyarakat umum belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal ada banyak cara untuk memaksimalkan peran komunitas dalam pembelajaran seperti mengundang komunitas untuk menjadi pengajar sehari di sekolah secara bergantian.

Berdasarkan dimensi praktik dalam *Index for Inclusion*, SD YBPK Semampir Kota Kediri telah memenuhi seluruh indikator dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kelebihan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD YBPK berdasarkan dimensi praktik terletak pada indikator siswa belajar secara bersama-sama, asesmen menyokong pencapaian seluruh siswa, seluruh siswa berpartisipasi dalam aktivitas diluar kelas, dan keahlian staf sangat bermanfaat. Indikator yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD YBPK berdasarkan dimensi praktik adalah pengajaran direncanakan dengan seluruh siswa berapa dalam pikiran, pelajaran mendorong partisipasi seluruh siswa, dan sumber sekolah didistribusikan secara adil sehingga dapat mendukung inklusi.

PEMBAHASAN

Kesiapan penyelenggaraan program sekolah inklusi tidak dapat dilihat hanya dari ketersediaan sarana dan prasarana serta

adanya Guru Pendamping Khusus. Booth dan Ainscow (2002) dalam *Index for Inclusion* menyatakan ada tiga dimensi yang digunakan untuk melihat kesiapan penyelenggaraan program inklusi yaitu dimensi budaya, dimensi kebijakan, dan dimensi praktik. Penggunaan Index, yang telah digunakan di beberapa Negara, dikembangkan secara terintegrasi dengan rencana pengembangan sekolah yang telah ada (Brausteiner, 2016).

Dimensi budaya dalam penyelenggaraan sekolah inklusi mengacu kepada sub dimensi yaitu membangun komunitas dan terbangunnya nilai-nilai inklusi. Budaya bukan hanya berasal dari pikiran, namun lebih kepada tindakan (Nes, 2009). Dalam proses penyelenggaraan program inklusi, SD YBPK telah mengubah konsep inklusi yang tadinya masih berupa angan-angan menjadi suatu program yang nyata untuk terus dikembangkan. Program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai inklusi telah dijalankan meskipun dalam praktiknya masih perlu pembenahan dan pengembangan lebih lanjut.

Penerapan budaya inklusi salah satunya dapat diamati melalui indikator-indikator yang terdapat dalam Index. Membangun komunitas dan mengembangkan nilai-nilai inklusi menjadi dua hal penting dalam menumbuhkan budaya inklusi. Berbagai latar belakang komunitas yang ada mulai dari guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah perlu menjadi perhatian. Jangan sampai perbedaan latar belakang dari berbagai elemen tersebut malah menjadikan hambatan dalam proses penyelenggaraan program inklusi. Nes (2009) menyebutkan bahwa “characteristics of the culture may create particular barriers, but can also ease inclusive thinking and practice”. Seperti yang diungkapkan Nes bahwa selain menjadi penghalang, perbedaan budaya juga dapat mempermudah cara berpikir dan bertindak seseorang secara inklusif. Hal tersebut tercermin dalam lingkungan SD YBPK yang mana semua orang merasa diterima

di lingkungan ini, siswa saling membantu satu sama lain, staf saling berkolaborasi, menghormati satu sama lain, dan memiliki hubungan yang harmonis. Akan tetapi keharmonisan yang tercipta antar komunitas di SD YBPK perlu lebih dikoordinir sehingga kekompakan yang ada dapat mendukung seluruh aspek pembelajaran mulai dari perencanaan, proses, dan evaluasi.

Stubbs (2008) dalam *Inclusive Education: Where they are a few resources* menyatakan “The success of inclusive education is not dependent on a perfect formula, but on people’s willingness to work with each other to identify and overcome barriers as they arise. This is why on-going participation is important. Mewujudkan budaya inklusi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan, namun butuh kerjasama dari banyak pihak atau komunitas terkait. Kerjasama ini yang nantinya dapat mewujudkan penerapan nilai-nilai inklusi. Dalam ranah sekolah dan pendidikan, guru tidak dapat berkerja sendiri dalam menyelenggarakan program inklusi, mereka membutuhkan dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait. Filosofi inklusi perlu disebarakan ke semua pihak seperti filosofi akan pentingnya ekspektasi dan harapan yang tinggi untuk peserta didik bahwa mereka semua mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, mampu berprestasi, dan tidak adanya tindakan diskriminatif. Filosofi tersebut telah dibagikan oleh pihak SD YBPK kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah meskipun dalam praktiknya pihak sekolah perlu lebih giat dan intensif membagikan filosofi tersebut.

Dimensi kedua dalam *Index for Inclusion* adalah dimensi kebijakan. Kebijakan ini meliputi strategi untuk merubah budaya kearah inklusi serta dukungan untuk semua aktivitas yang dapat meningkatkan kapasitas sekolah dalam merespon perbedaan dari peserta didik (Booth & Ainscow, 2002). Strategi yang dilakukan oleh SD YBPK dalam menerapkan kebijakan inklusi adalah

melalui penerimaan staf dan siswa yang terbuka selama daya tampung sekolah masih memenuhi. Semua staf atau guru dan siswa baru dibantu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Ada kelas tambahan serta program ekstrakurikuler yang membantu meningkatkan minat dan bakat peserta didik. Forum koordinasi untuk guru dan staf dilakukan secara rutin untuk memastikan proses pembelajaran serta program sekolah secara keseluruhan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bagi peserta didik, ada semacam program tutor sebaya yang mana siswa regular diminta untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus didalam dan diluar kelas serta membantu mereka untuk belajar memahami materi yang disampaikan oleh guru.

Salah satu praktik dari penyelenggaraan inklusi di sekolah dapat dilihat dalam proses pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, proses, dan evaluasi. *Teacher and teaching practice play a significant role in the development of inclusive education. Finding ways to develop more active, flexible, and innovative teaching practice is therefore vital* (Stubbs: 2008). Proses pembelajaran yang baik adalah melalui proses perencanaan yang matang seperti pembuatan RPP dan PPI yang sesuai dengan karakteristik siswa. Penerapan PPI di SD YBPK mulai diperkenalkan sejak tahun 2013 dimana GPK membuat PPI yang berbeda untuk masing-masing siswa yang berkebutuhan khusus. Melalui perencanaan yang matang, siswa diharapkan untuk turut aktif dalam kegiatan belajar mengajar baik didalam maupun diluar kelas. Kegiatan belajar siswa diluar sekolah juga dapat direncanakan melalui pemberian tugas yang berupa tugas akademik atau tugas dalam bentuk prakarya. Proses pembelajaran di SD YBPK mengacu kepada RPP dan PPI secara umum, namun ketika terdapat kendala pada siswa, standar dari PPI akan diturunkan. Kegiatan belajar mengajar didalam kelas lebih sering menggunakan metode konvensional seperti

ceramah dan penugasan, oleh sebab itu penggunaan berbagai metode perlu lebih ditekankan.

Pemahaman pendidikan inklusi seperti yang tertuang dalam *Index for Inclusion* tidak hanya terpaku pada perbedaan yang dimiliki oleh siswa (Booth & Ainscow, 2002). Perbedaan yang dimiliki oleh siswa, guru dan komunitas lainnya dapat dijadikan sumber pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi siswa. Perbedaan yang adalah adalah aset yang berguna bagi sekolah sebagai sumber belajar. Yayasan SD YBPK memahami betul perbedaan dan keahlian yang dimiliki oleh para guru untuk membantu proses belajar mengajar serta meningkatkan partisipasi siswa dalam semua kegiatan sekolah. Disisi lain, perbedaan serta keahlian yang dimiliki komunitas lain seperti orang tua dan masyarakat sekitar belum termaksimalkan secara maksimal oleh pihak sekolah. Seharusnya keahlian yang dimiliki oleh komunitas seperti orang tua dan masyarakat sekitar dikoordinir untuk membantu sekolah dalam mengurangi hambatan belajar dan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Tiga dimensi dari *Index* adalah saling berkaitan satu sama lain. Nilai dalam dimensi budaya tentang menghargai perbedaan harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan dalam bentuk strategi meminimalisir tindakan bullying, dan dalam praktiknya diimplementasikan dengan membangun hubungan yang harmonis baik di kelas maupun luar sekolah (Nes, 2009). Secara keseluruhan penerapan budaya, kebijakan dan praktik inklusi di SD YBPK telah berjalan dengan baik sesuai keseluruhan indikator yang ada, namun pada beberapa indikator masih perlu ditingkatkan dan dan dikembangkan sehingga keseluruhan indikator yang ada mampu mendorong terwujudnya nilai-nilai inklusi secara maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi SD YBPK Semampir di Kota Kediri telah berjalan secara optimal dengan terpenuhinya seluruh indikator yang terdapat dalam dimensi-dimensi *Index for Inclusion*. Meskipun dalam proses penyelenggaraannya ada beberapa indikator yang perlu dikembangkan dan menjadi prioritas untuk semakin meningkatkan nilai-nilai inklusi.

Kelebihan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD YBPK terletak pada indikator semua orang merasa diterima, staf saling berkolaborasi, adanya ekspektasi atau harapan yang tinggi terhadap siswa, dan siswa dipandang sama. Indikator yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi kedepannya adalah siswa saling membantu satu sama lain, seluruh komunitas membagikan filosofi inklusi, semua komunitas lokal terlibat di sekolah, dan sekolah berusaha meminimalisir semua bentuk diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD YBPK berdasarkan dimensi kebijakan memiliki beberapa kelebihan yang terletak pada indikator penunjukan dan promosi staf berlangsung dengan adil, sekolah membuat bangunan yang dapat diakses oleh semua orang, semua siswa baru dibantu untuk merasa nyaman di sekolah, dan semua bentuk dukungan dikoordinasi. Indikator yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah sekolah menerima semua siswa yang berdekatan dengan sekolah, aturan atau Undang-Undang tentang layanan pendidikan khusus digunakan untuk mengurangi hambatan dalam belajar dan hambatan berpartisipasi semua siswa, dan tindakan bullying diminimalisir.

Kelebihan penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan dimensi praktik terletak pada indikator siswa belajar secara bersama-sama, asesmen menyokong pencapaian

seluruh siswa, seluruh siswa berpartisipasi dalam aktivitas diluar kelas, dan keahlian staf sangat bermanfaat. Indikator yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD YBPK berdasarkan dimensi praktik adalah pengajaran direncanakan dengan seluruh siswa berpa dalam pikiran, pelajaran mendorong partisipasi seluruh siswa, dan sumber sekolah didistribusikan secara adil sehingga dapat mendukung inklusi.

Saran

Terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang peneliti ajukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan memperbaiki praktik penyelenggaraan program pendidikan inklusi di lembaga penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu mengoptimalkan peran dari masing-masing komunitas seperti siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk membantu menyebarkan filosofi dari inklusi dan membantu terselenggaranya proses belajar mengajar yang aktif. Memperbanyak siswa reguler yang dijadikan sebagai tutor sebaya untuk membantu mengurangi hambatan siswa, khususnya bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dalam belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan setempat memfasilitasi alat penunjang pembelajaran dan alat terapi bagi siswa berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., Dyson, A. & Weiner, S. (2013). *From exclusion to inclusion: Ways of responding in school to students with special education needs*. Education University of Manchester: Centre for Equity
- Agustin, I. (2016). Manajemen sekolah inklusi di Sekolah Dasar Summersari 1 Kota

- Malang. *Education and Human Development Journal*. 1(1): 27-33.
- Ariastuti, R. & Herawati, V. D. (2016). Optimalisasi peran sekolah inklusi. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. 1(1): 38-47.
- Bogdan C. R. (1992). *Qualitative research for education*. Stracause University: Allyn and Bacon.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
- Braunsteiner, M. L. (2016). Implementing the *Index for Inclusion* for inclusive school: A new paradigm. *R&E Source*, special issue (5): 1-6.
- Buat terobosan baru, Kota Kediri siapkan jalur inklusi di belasan sekolah negeri ini. (2017, 7 Juni). *Tribunjatim.com* [online]. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 dari <http://jatim.tribunnews.com/2017/06/07/buat-terobosan-baru-kota-kediri-siapkan-jalur-inklusi-di-8-belasan-sekolah-negeri-ini>.
- Creswell J. (2015). *Riset pendidikan: Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif*. Terj. Helly Prajitno Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data. (2016) *Gambaran sekolah inklusif di Indonesia: Tinjauan sekolah menengah pertama*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Kadir, A. (2015). Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1): 2-22.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, 2 (4): 34-46.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nes, K. (2009). The role of the *Index for Inclusion* in supporting school development in Norway: A comparative perspective. *Research in Comparative and International Education*, 4(3): 305-320.
- Ni'matuzahroh. (2015). Analisis kesiapan guru dalam pengelolaan kelas inklusi. *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*. Malang: Psychology Forum UMM.
- Pedomanteknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur. (2012). Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif. (2007) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Kompas Online. (2009) Pendidikan anak berkebutuhan khusus jangan dilupakan! Retrieved from <http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/15/18333494/pendidikan.anak.berkebutuhan.khusus.jangan.dilupakan>.
- Kompas Online. (2009) Pendidikan Inklusi masih banyak kendala. Retrieved from <http://edukasi.kompas.com/read/2009/11/04/0856498/pendidikan.inklusi.masih.banyak.kendala>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa. (2009). Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur. (2011). Surabaya: Biro Hukum Sekretariat daerah Jawa Timur.
- Poerwandari, E.K. (2005). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Berita Jatim Online. (2016). Sekolah inklusi SDN Betet I Kota Kediri terbesar di Jatim. Retrieved from http://beritajatim.com/pendidikankesehatan/283595/sekolah_inklusi_sdn_betet_1_kota_kediri_terbesar_di-Jatim.html.
- Stubbs, S. (2008). *Inclusive education: Where there are few resources*. Oslo: The Atlas Alliance.
- Sugihartono, dkk. (2007). *Psikologi pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sunanto, J. (2009). Indeks inklusi dalam pembelajaran di kelas yang terdapat ABK di sekolah dasar. *JASSI_anakku*, 8 (2), 78-84.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Wahyuhastufi, A. (2016) Identifikasi hambatan-hambatan guru dalam pembelajaran di kelas IIIA sekolah inklusi SDN Giwangan Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 2(5):81-86.
- Zabeli, N. & Behluli, L. (2014). *Index for Inclusion-facts and opinion*. Prishtina: Save the Children
- Zuroidah, N. & Zahrol, F. (2015) Implementasi pendidikan inklusi di Kota Kediri: studi kasus di SMP YBPK Kediri. *Empirisma*, 24(2): 214-226.